

## **BAB IV**

### **KERJASAMA EKONOMI CINA-ASEAN**

Sejak Cina tidak terlalu terfokus di Taiwan, akibat yang di hasilkan dari perubahan politik Cina dari tertutupan ke keterbukaan yang di latarbelakangi dari perubahan ekonomi ini adalah perebutan SDA dan kekuasaan saling tanam pengaruh satu terhadap yang lain, Cina mulai bergeser sedikit dari Taiwan dan memilih lautan di bawah Taiwan sebagai isu perbatasan barunya.

Cina di bawah Deng Xiaoping yang mampu memulihkan ekonomi moneter di negaranya hingga mampu melunasi hutang-piutang merupakan hal signifikan yang di capai serta mengagetkan dunia di masa global ekonomi moneter krisis yang tidak menentu, terlebih lagi bahwa perubahan Cina pada dasarnya memiliki impact besar terhadap dunia, dikarenakan Cina sebagai salah satu aktor besar perpolitikan internasional selain Amerika dan Rusia.

Langkah, strategi, dan kebijakan Cina mengacu pada potensi SDA dan perdagangannya, terutama minyak crude oil yang rawan, fluktuasi harga sangat tinggi dipasar dunia. Momen tersebut diolah dengan baik di bidang produksi, kemampuan Cina untuk menyerap teknologi dari Uni Soviet menjadi alasan utama perkembangan Cina yang stabil hingga saat ini.

Perpolitikan internasional yang dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi untuk unsur-unsur yang terkait utamanya adalah kerjasama ataupun perdagangan di bidang persenjataan dan pertahanan, sejak di masa Deng Xiaoping hal itu berubah dan terjadi pemisahan politik dan ekonomi, Cina siap kompetitif dimata dunia dengan perdagangan yang lebih terbuka, tidak ada nuansa demam "Great Leap Forward" yang mana banyak orang menjatuhkan dirinya dari atas gedung,<sup>52</sup>Cina sudah go internasional dan banyak menjalin peningkatan kerjasama lateral, bilateral dalam bidang ekonomi moneter perdagangan pembangunan, termasuk dengan negara ketiga.

Asia Tenggara sebagai wilayah regional yang berisikan negara-negara berkembang adalah wilayah yang di bidik oleh Cina untuk berbagai isu, awalnya bagi Cina Asia Tenggara lebih terkesan wilayah konflik dan tidak ada harapan kerjasama di sana, terutama saat krisis kamboja yang mana Vietnam melakukan agresi, namun sejak terbentuknya ASEAN dan mulai menemukan kesolidannya sejak Indonesia bergabung hingga mampu mengundang pihak luar untuk bergabung dalam forum ASEAN, ASEAN berkembang menjadi salah satu partner utama kerjasama dagang dan ekonomi Cina, terlepas itu terdapat maksud-maksud politik terkait Taiwan maupun isu perbatasan Laut Cina Selatan.

Berawal dari ASEAN+3 hubungan ini semakin menemukan bentuknya, ASEAN adalah pasar bagi produk Cina seperti tekstil, sepeda motor, dan barang elektronik,

---

<sup>52</sup>Yufan Hao dan Guocang Huan, *The Chinese View of the World*, Random House, New York, 1989. Hal. xxiii

selain itu lebih dari dua juta turis Cina mengunjungi negara-negara ASEAN sepanjang tahun 2000.<sup>53</sup>

### **A. Perubahan Geo Politik Asia Tenggara, Pandangan Ekonomi dan Politik Cina di Awali Dari Deng Xiaoping Membuka Pintu Kerjasama Ekonomi Cina-Asean**

Deng Xiaoping yang melaju pada jalur reformasi politik dan ekonomi menitikberatkan tujuan Cina dalam membenahan ekonomi, dan itu adalah pertama kalinya dalam sejarah Cina menentukan ekonomi sebagai tujuan pembangunannya yang utama.

Dengan berbekal industrialisasi yang telah di jalankan Mao Zedong sebelumnya, Deng Xiaoping mendapatkan permasalahan bahwasannya Cina tidak bisa terus bergantung pada Soviet, di masa Deng Xiaoping ini salah satu bentuk reformasinya adalah pemisahan kacamata ekonomi dan politik, walaupun secara politik Cina saat itu sedang tidak 'romantis' dengan Soviet namun Deng Xiaoping tetap menjalin kerjasama ekonomi dengan Soviet. Selain itu Cina juga mulai menjalin kerjasama ekonomi dengan banyak Negara termasuk Negara-negara di Eropa.<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup>Bambang Cipto, *op.cit.*, hal. 179.

<sup>54</sup>Yufan Hao dan Guocang Huan, *op.cit.*, hal. Xi.

Setelah menjalin kerjasama dengan Eropa, Cina pun melirik Negara-negara di dunia ketiga termasuk Negara-negara di Asia Tenggara, permasalahannya adalah posisi Cina di dunia ketiga selalu pembahasan hal yang “general” dan tidak spesifik, dan Cina terkesan “beretorika” daripada “substantive”.<sup>55</sup>

Dalam hubungan internasional dengan negara ke tiga Cina kerap berbahasa: “hubungannya dengan ASEAN, hubungannya dengan Amerika Selatan, saat itu Cina belum memiliki hubungan khusus dengan salah satu negara di dunia ketiga, Cina pun kerap memandang negative tentang negara-negara di dunia ketiga, termasuk menyebut negara-negara berkembang ini sebagai negara dunia ketiga, banyak permasalahan ekonomi, dan terpecah belah.

Melihat hal ini Mao Zedong merubah retorika dan cara pandang Cina, sebelumnya bagi Cina negara-negara berkembang hanyalah pasar potensial untuk penjualan senjata saja, namun Mao Zedong melihat bahwa negara-negara berkembang adalah pasar yang potensial yang mana kebutuhan transfer teknologi mereka juga sangat tinggi.

Saat Vietnam memenangkan peperangan melawan Amerika, Amerika mundur secara cepat dari Asia Tenggara dan menghapus dominasinya di Asia Tenggara, menyisakan pangkalan militernya di Filipina, setelah merasakan kemenangan atas Amerika, Vietnam merasa dunia internasional akan meligitimasi langkah militernya, pada tahun 1978 Vietnam dengan bantuan besar-besaran dari Soviet menginvasi kamboja dan menandakan era Soviet di Asia Tenggara.

---

<sup>55</sup>Yufan Hao dan Guocang Huan, *op.cit.*, hal. 227.

Meninggalnya Stalin dan pergantian kekuasaan ke Nikita Krushchev membuat semua hal berubah, Krushchev menerapkan politik luar negeri Rusia yang lebih 'lembut', tidak hanya Krushchev menarik misil SS-20 nya yang mengarah ke Cina, bahkan Krushchev berjanji akan menarik Vietnam dari Kamboja, namun kondisi ini tidak banyak berubah walaupun lebih 'lembut' namun Soviet sangat berat melepaskan markas militernya di Vietnam.

Sepeninggal masa Krushchev, Rusia di masa Gorbachev mengalami permasalahan internal yang sangat mendalam, Soviet terancam runtuh, hal ini dimanfaatkan Deng Xiaoping dengan menyerang Vietnam dan Cina berkilah bahwa hal ini untuk memberikan pelajaran bagi Vietnam, pada akhir tahun 80 an, hamper semua pengaruh Soviet menghilang dari Asia Tenggara, dan menyisakan Cina sebagai penguasa regional, walaupun begitu tidak serta merta negara-negara di Asia Tenggara mau tunduk pada Cina dan mengikuti kemauan Cina.

Saat dunia internasional terpusat pada Vietnam dan Kamboja, negara-negara di Asia Tenggara secara mengejutkan sudah menjadi solid dan kompak dalam tubuh ASEAN, Cina sendiri tidak menyadari akan adanya ASEAN yang ke depannya akan mempersulit usaha komunikasi via bilateralnya yang akan selalu di jadikan komunikasi multilateral.

Cina akhirnya melihat ASEAN bukan sekumpulan negara bermasalah, namun lebih ke arah pembangunan kerjasama ekonomi dan pengembangan pasar, akhirnya Cina dengan semangat “wai xiang jing ji zhan rei” nya yaitu strategi ekonomi yang ‘go internasional’ memiliki Asia sebagai pasar utamanya, kerjasama Cina dengan Asia memiliki angka tertinggi di banding kerjasamanya dengan Afrika maupun negara-negara di Amerika Latin, cara pandang Deng Xiaoping terbukti bahwasannya kerjasama ekonomi dengan negara-negara ketiga sangat bermanfaat, tergambar dalam porsi kerjasama ekonomi yang mana memiliki porsi berkisar dari ¼ hingga 1/5 total dari perdagangan mereka di dunia.<sup>56</sup> Kerjasama ekonomi Cina-ASEAN belum memiliki nilai-nilai legalitas tertentu dan keterikatan, namun hanya “deal to deal basis”, walau begitu perkembangan ekonomi Cina-ASEAN di masa Deng Xiaoping ini mengalami perkembangan hingga 7,4 persen.<sup>57</sup>

Perkembangan dari pertumbuhan ekonomi Cina-ASEAN ini adalah salah satu alasan kenapa akhirnya Cina di masa paska Deng Xiaoping memperkuat hubungan ekonominya, pada tahun 1985 adalah puncak kerjasama ekonomi yang terjadi antara Cina-ASEAN, jumlah kerjasama ini terhitung 3,22 billion dolar sepanjang tahun itu 18 kali lipat dari tahun 1971.

---

<sup>56</sup>Yufan Hao dan Guocang Huan, *op.cit.*, hal. 245.

<sup>57</sup>Yufan Hao dan Guocang Huan, *ibid.*, hal. 215.

## **B. Kelanjutan Kerjasama Ekonomi Cina-Asean Paska Deng Xiaoping**

Kerjasama ekonomi Cina-ASEAN di tandai dengan kunjungan dari berbagai petinggi Cina, diawali dari perdana menteri Li Peng saat berkunjung ke Bangkok yang menegaskan bahwa: “Cina akan membangun kerjasama ekonomi dan mendukung inisiatif kerjasama regional bersama-sama ASEAN”, Cina menunjukkan besarnya kepentingan Cina menjaga ke amanan Asia Tenggara sebagai bagian dalam usahanya untuk membangun kerjasama ekonomi dengan ASEAN.

Pada tahun 1986 Li Peng mengirim wakil perdana menteri Cina Tian Jiyun untuk melakukankunjungan ke 4 negara di ASEAN sebagai bagian dari penerusan agenda kerjasama ekonomi Cina-Asean nya, dalam kunjungannya itu Tian Jiyun berkali-kali menegaskan bahwa kerjasama ekonomi Cina-ASEAN akan semakin menjadi prospek yang bagus bagi ke 2 belah pihak, Cina menawarkan pada ASEAN:

1. Persahabatan dan kerjasama ekonomi yang memuaskan di kedua belah pihak.
2. Kerjasama tidak terbatas pada perjanjian-perjanjian dagang saja, Cina menyambut positif kerjasama dan investasi industry.
3. Memperluas cakupan kerjasama ekonomi Cina dan ASEAN harus memulainya dari perdagangan dari per barang hingga nantinya berkembang ke perdagangan mata uang.

Dengan segala perkembangan kemajuan kerjasama ekonomi di antara CINA-ASEAN sayangnya kenyataan angka kerjasama aktual di antara Cina-ASEAN hanya dapat mencapai 1,5 persen.

Halangan utama di antara Cina-ASEAN adalah kesamaan komoditas eksportnya, hampir semua negara-negara anggota ASEAN mengandalkan produk bahan-bahan material mentah, minyak, dan “low-industrby product”, hal ini diperburuk dengan ekspor dari ASEAN yang terjadi ke negara selain Cina bertabrakan, seperti pada kasus perdagangan minyak Indonesia-Jepang, Jepang memiliki kebutuhan minyak yang sangat tinggi dan dalam pemenuhannya Jepang membeli minyak dari berbagai negara, Cina adalah salah satu negara yang menjual minyaknya kepada Jepang, Indonesia sebagai salah satu penjual minyak ke Jepang di ancam oleh pihak Cina agar tidak menjual minyaknya kepada Jepang, di sisi lain Jepang memanfaatkan hal ini untuk menawar harga minyak Indonesia, hal ini menimbulkan kurangnya efektifitas perdagangan Cina-ASEAN.

Menanggapi apa yang terjadi pada kerjasama ekonomi Cina-ASEAN, beberapa negara anggota ASEAN mendesak Cina agar berinvestasi di Asia Tenggara dan mengimplementasikan praktek ekonominya sesuai dengan yang di janjikan, Cina bereaksi dengan langkahnya untuk melakukan transfer tekhnologi kepada ASEAN dan penciptaan lingkungan yang kondusif bagi perdagangan Cina-ASEAN.

Sejak masa krisis ekonomi hubungan ekonomi Cina-ASEAN berkembang sangat pesat, walau tersandung isu perbatasan Laut Cina Selatan seakan kedua negara tidak perduli dan tidak membahas isu Laut Cina Selatan sedikitpun pada pertemuan mereka di ASEAN+3, lebih jauh lagi terkait komitmen Cina akan pembangunan kerjasama ekonomi mereka.

Setelah satu dekade berlalu dengan tenang, konflik Laut Cina Selatan muncul kembali sebagai topik utama dalam perdebatan tentang isu keamanan di Asia Timur. Dilihat dari berbagai sudut pandang, konflik ini merupakan ujian yang menentukan (litmus test) bagi hubungan Cina dengan ASEAN dan negara-negara anggotanya. Konflik Laut Cina Selatan merupakan bagian yang tak terpisahkan, dan merupakan satu perwujudan dari hubungan yang mendasar tersebut. Jika kedua pihak tidak dapat mengatasi konflik Laut Cina Selatan, lalu apa yang akan tersisa sebagai hasil penerapan kebijakan “keterlibatan positif” (positive engagement) selama dua dekade di bawah payung diplomasi “soft power” dan “constructive engagement” (keterlibatan yang setara)?

Meskipun situasi di Laut Cina Selatan menjadi pusat perhatian belakangan ini, isu tersebut sebenarnya bukan barang baru. Di awal 1990-an topik tersebut telah diperkirakan khususnya oleh para analis Amerika, akan menjadi konflik yang tak berkesudahan. Dilihat secara sepintas, situasi saat ini mungkin mirip dengan situasi pada era 1990-an. Akan tetapi, ketika diperhatikan dengan lebih mendalam, sangat jelas bahwa kondisi sebenarnya berbeda. Perubahan-perubahan besar telah terjadi di dalam hubungan Cina dan ASEAN, begitu pula di dalam sistem regional semenjak awal 1990-an. Secara keseluruhan, telah terbentuk suatu hubungan yang positif dan konstruktif di antara Cina dan ASEAN, khususnya di bidang ekonomi yang telah mengubah berbagai aspek menyangkut dinamika politik, ekonomi, sosial, dan keamanan di kawasan tersebut. Semua perubahan ini tidak bersifat sementara, tetapi akan terus-menerus

mempengaruhi perilaku para pihak terhadap satu sama lain, termasuk di dalam lingkup konflik Laut Cina Selatan.

Salah satu faktor paling penting di balik pertanyaan “bagaimana Cina dan ASEAN telah berhasil mengembangkan hubungan semenjak akhir Perang Dingin” adalah upaya yang ditempuh oleh kedua belah pihak dengan mendayagunakan sumber-sumber “soft power” yang mereka miliki dalam mendekati pihak yang lain. Cina telah mencoba untuk menghapus persepsi tentang Cina sebagai ancaman di Asia Tenggara dengan membentuk (ulang) keberpihakan negara-negara Asia Tenggara terhadap Cina menggunakan diplomasi “soft power,” sementara ASEAN dan negara-negara Asia Tenggara telah menerapkan strategi “constructive engagement” terhadap Cina sebagai upaya untuk membuat Cina terlibat di dalam organisasi regional dan meyakinkan Cina untuk menerima sejumlah norma-norma regional dan kebiasaan-kebiasaan regional, seperti keterlibatan secara multilateral dan “cara ASEAN” (ASEAN way).

Di awal 1990-an Cina menerapkan suatu strategi pasca Perang Dingin yang baru, bercirikan kebijakan “good neighbourhood” (bertetangga yang baik), yang bertujuan untuk menjadikan Asia Tenggara sebagai model strategi bagi “kebangkitan Cina yang damai” (peaceful rise). Pada saat yang sama, ASEAN juga menjalankan suatu kampanye diplomatik untuk melibatkan diri, daripada mengisolasi, dengan Cina. Oleh karena itu, ada suatu proses timbal balik di antara strategi “constructive engagement” ASEAN dan pengadopsian diplomasi “soft power” oleh Cina untuk menepis persepsi tentang Cina sebagai ancaman. Pemulihan hubungan baik di antara

Cina dan ASEAN ini akan menjadi proses perubahan-identitas dalam jangka waktu panjang bagi kedua belah pihak, yang telah menafsirkan ulang kepentingan-kepentingan mereka dan mengubah cara mereka bersikap terhadap satu sama lain. Pemulihan hubungan baik ini merupakan hal yang mendasar dalam memahami mengapa Cina dan ASEAN telah berupaya untuk memelihara hubungan mereka dalam cara yang konstruktif dan damai dan mengapa hubungan di antara Cina dan ASEAN tersebut telah berkembang menuju arah yang positif, termasuk di dalamnya mengenai Laut Cina Selatan.<sup>58</sup>

Seiring dengan berjalannya waktu, khususnya semenjak 2000, Cina telah beralih peran dari sekedar peserta menjadi tokoh proaktif di dalam lingkup multilateral. Alasannya adalah pemahaman tentang Cina dan maksud-maksud yang terkandung dari tindakan Cina yang tidak berbahaya itu akan mengubah pandangan dan kepentingan para aktor lainnya di Asia dan dengan demikian, akan menguntungkan Cina. Selama ini kerjasama multilateral dengan Cina sering terinstitusionalisasikan sesuai dengan cara yang diinginkan oleh ASEAN.

Penerimaan Cina terhadap multilateralisme dan institusionalisasi atas hubungan damai telah menciptakan suatu kerangka struktural dalam berbagai forum, dialog, dan norma-norma serta praktek-praktek diplomatik yang diterima. Institusionalisasi merupakan suatu bagian penting dari upaya ASEAN untuk melibatkan diri dengan Cina

---

<sup>58</sup> [www.kyotoreview.org](http://www.kyotoreview.org). Mikael Weissmann, "The South China Sea Conflict and Sino-Asean Relations: A Study in Conflict Prevention and Peace Building," *Asian Perspective* 34, no. 3 (2010); *The East Asian Peace: Conflict Prevention and Informal Peacebuilding* (Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2012); "Why Is There a Relative Peace in the South China Sea?," in *Entering Unchartered Waters? Asean and the South China Sea Dispute*, ed. Pavin Chachavalpongpun (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2014)

dan membantu untuk meningkatkan keuntungan di dalam perdamaian dan stabilitas regional. Lebih jauh lagi, hal ini juga menjamin bahwa Cina tidak akan menjadi ancaman seperti yang selama ini ditakutkan. Tujuan jangka panjang dari upaya untuk melibatkan Cina, adalah untuk mengunci Cina di dalam suatu institusi multilateral dalam skala regional, yang tidak hanya memoderenisasi tetapi juga mengubah perilaku Cina secara regional, telah berhasil dicapai sedikit demi sedikit: perilaku Cina telah menjadi lebih moderat, dan Cina telah menjadi terbiasa untuk, dan menurut dengan, keterlibatan di dalam forum multilateral.<sup>59</sup> Lebih jauh lagi, Cina juga menerima “cara ASEAN” sebagai prinsip diplomatik dan juga telah memulai untuk memberi perhatian terhadap kepentingan negara-negara tetangganya. Ini merupakan proses timbal balik di antara diplomasi “soft power” Cina dan kebijakan politik “constructive engagement” ASEAN.

Pada saat yang sama, karena adanya hubungan yang baik dan penerimaan Cina atas multilateralisme termasuk juga kesediaan Cina untuk terlibat dengan ASEAN sebagai satu kesatuan, muncul satu asumsi di kalangan analis bahwa Cina akan bersikap agresif dan konflik Laut Cina Selatan akan menjadi konflik yang tak berkesudahan. Meski demikian, semenjak pertengahan 1990-an terlihat adanya penurunan ketegangan di dalam konflik SCS. Salah satu kunci penting di balik hal tersebut adalah pernyataan Cina sebelum berlangsungnya Forum Regional ASEAN (ARF) di tahun 1995 berkaitan dengan keinginan Cina untuk mendiskusikan masalah Spratly dalam latar multilateral.

---

<sup>59</sup> Daojiong Zha and Weixing Hu, *Building a Neighborly Community: Post-Cold War China, Japan, and Southeast Asia* (Manchester: Manchester University Press, 2006), 121-2.

Dua tahun kemudian, konflik Laut Cina Selatan bahkan dimasukkan dalam agenda ARF. Ini merupakan hal yang penting dalam proses yang berujung pada “Deklarasi Pernyataan Sikap Para Pihak yang terlibat di Laut Cina Selatan (Declaration on the Conduct of Parties in the South Cina Sea) di tahun 2002.